

lecturer has the authority to educate and shape the behaviour of students, especially in the school environment so as to



inculcate the values of human rights. Sixth, the road to democratic society that upholds human rights can not rely solely on the capabilities of the people involved in politics directly, but also through other people who do not take part directly in the political scene, both locally and nationally.

Objectives

1. To generate lecturers as an agent of human rights respect and enforcement.

2. Enriching lecturers' insights on human rights, especially young ones.

rights to the wider community still very urgent, since human rights abuses still occur in various regions in Indonesia. In that context, lecturers-especially in faculties of law-is the right strategic group to be trained in this perfect momentum; Why? First, lecturers had opportunity to involve in the preparation process as well as in critical review of the various policy of the State. Second, in their social role, lecturers often regarded as figure that people looking up to. Third, lecturers has the potency to become agents of social change in the political reform era, and therefore lecturers are very strategic to take the community to substantially strengthen their respect, recognition and enforcing human rights. Fourth, lecturers in fact have a valuable contribution in various forms of social change, especially in shaping the behaviour of their students. Fifth, the

pertemuan informal. Di tengah-tengah situasi tersebut, ternyata masih sering diketemukan mispersepsi mengenai hak asasi manusia, bahkan di kalangan akademisi sekalipun. Mispersepsi tersebut muncul antara lain pada pikiran dikotomis yang menyebut hak asasi manusia sebagai produk barat dan tidak untuk orang timur, campur baumnya antara paradigma hukum pidana, tata negara dan hak asasi manusia, dan lain-lain. Pada sisi yang lain, kebutuhan untuk selalu mendiseminasikan hak asasi manusia kepada masyarakat luas dirasa masih sangat diperlukan mengingat fluktuasi pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dalam konteks itu, dosen—khususnya di berbagai fakultas hukum--adalah kelompok strategis yang tepat untuk ditraining dalam momentum yang tepat sekarang ini; Mengapa? *Pertama*, dosen memiliki peluang

untuk terlibat dalam penyusunan maupun terlibat dalam melakukan telaah kritis terhadap berbagai kebijakan yang diambil oleh negara. *Kedua*, dalam peran sosialnya, dosen sering dianggap tokoh yang dijadikan rujukan perilaku warga masyarakat. *Ketiga*, dosen memiliki potensi menjadi agen perubahan sosial



dalam era reformasi politik yang sedang berlangsung sehingga sangat strategis dalam menghantarkan masyarakat menuju penguatan penghormatan, penghargaan dan penegakan hak asasi manusia dalam arti substansial. *Keempat*, dosen pada kenyataannya, memiliki sumbangan yang berharga dalam berbagai bentuk perubahan sosial, terutama dalam membentuk

perilaku siswa-siswanya. *Kelima*, dosen memiliki otoritas mendidik dan membentuk perilaku murid terutama di lingkungan sekolah sehingga dapat menanamkan nilai-nilai hak asasi manusia. *Keenam*, jalan menuju masyarakat



demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia tidak bisa bertumpu semata-mata pada kapabilitas orang-orang yang terlibat politik secara langsung, tetapi juga melalui orang lain yang tidak berkiprah secara langsung di panggung politik, baik lokal maupun nasional.

Tujuan Kegiatan

1. Untuk mengkondisikan dosen sebagai agen penghormatan, penghargaan dan penegakan HAM.

2. Menambah wawasan ilmu pengetahuan para dosen tentang hak asasi manusia, terutama dosen-dosen muda.

B. Deskripsi

Pelatihan HAM dasar yang diselenggarakan di Hotel Jogjakarta Plaza tanggal 26-29 September 2011 ini dihadiri oleh dosen-dosen muda dari seluruh universitas di Indonesia terutama yang mempunyai Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial. Selama 4 hari peserta pelatihan yang berjumlah 37 orang, terdiri dosen dan aktifis HAM. Mereka sangat serius mendiskusikan materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber sehingga forum berlangsung dengan antusias, dan dialog interaktif sering terjadi antara peserta narasumber. Bahkan banyak peserta yang mengangkat kasus pelanggaran HAM di daerah untuk dianalisis dengan teori HAM yang

- speaker. The training materials are as follows:
1. *Introduction to Human Rights* by Dr. Andang Listya Binawan, SJ (Driyarkara School of Philosophy)
 2. *Convention against Torture and Anti Discrimination* by Zainal Abidin, S.H. (ELSAM Jakarta)
 3. *Civil and Political Rights* by Idrhal Kasim, S.H. (Chairman of National Human Rights Commission)
 4. *ESC Rights* by Sri Palupi (Director of Institute for Ecosoc Rights)
 5. *Human Rights, State of Law, and Democracy* by Prof. Dr. Satya Arianto (Senior Professor of Faculty of Law University of Indonesia Jakarta)
 6. *State Responsibility as State Party* by Kjetil F. Alvsaker (Legal Adviser NCHR University of Oslo Norway)

human rights conveyed by the



Basic human rights training held in Jogjakarta Plaza Hotel on 26-29 September 2011 was attended by young lectures from all universities in Indonesia, especially who have the Faculty of Law and Faculty of Social Sciences. This four day training was attended by 37 participants, consisting of lecturers and human rights activists. They are very serious in discussing the materials presented by the speakers so that the forum took place with great enthusiasm, and interactive dialogue frequently arises. In fact, many participants reveal human rights violations in their respective areas to be analyzed with the theory of

B. Activity Description

This activity was conducted one day after the basic human rights training for lecturers were finished. The participants are the same

B. Description
 This activity was conducted one day after the basic human rights training for lecturers were finished. The participants are the same

more sensitive to their surrounding conditions on public health, especially reproductive health. Their task in universities can be used as a means to disseminate reproductive health rights to the students, local communities and stakeholders.



collaboration between the Women's Health Foundation and PUSHAM UII. This activity is to provide insight for the participants that are scholars on reproductive health issues including Law number 36 of 2009 on Health. Besides building an understanding on the importance of reproductive health, the participants are expected to be

participants are expected to be

Socializing Reproductive Health Rights and Law number 36 of 2009

8. *Human Rights Law and Humanitarian Law* by Dr. Fadillah Agus, S.H., M.H.

7. *Human Right Law Politics in Indonesia* by Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si (Commissioner of National Judicial Commission)

A. Background

This activity is the second

disampaikan oleh narasumber. Adapun materi dalam pelatihan ini adalah sebagai berikut:

1. *Pengantar Hak Asasi Manusia* oleh Dr. Andang Listya Binawan, SJ (Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat Driyarkara)
2. *Konvensi Anti Penyiksaan dan Anti Diskriminasi* oleh Zainal Abidin, S.H. (ELSAM Jakarta)
3. *Hak Sipil dan Politik* oleh Ifdhal Kasim, S.H. (Ketua KOMNAS HAM RI)
4. *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya* oleh Sri Palupi (Direktur Institute for Ecosoc Rights)

5. *Hak Asasi Manusia, Negara Hukum dan Demokrasi* oleh Prof. Dr. Satya Arinanto (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta)
6. *Tanggung Jawab Negara setelah Menjadi Negara Pihak* oleh Kjetil F. Alvsaker (Penasehat Hukum NCHR Universitas Oslo Norwegia)
7. *Perkembangan Politik Hukum HAM di Indonesia* oleh Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si (Komisioner Komisi Yudisial RI)
8. *Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter* oleh Dr. Fadillah Agus, S.H., M.H.

Sosialisasi Hak Kesehatan Reproduksi dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009

A. Latarbelakang

Kegiatan ini merupakan kali kedua kerjasama antara Yayasan Kesehatan Perempuan dan



Pusham UII. Kegiatan ini dilakukan

untuk memberikan pemahaman pada peserta, yang notabene ialah seorang akademisi,

tentang isu kesehatan reproduksi

termasuk dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain untuk membangun pemahaman akan pentingnya kesehatan reproduksi, diharapkan para peserta dapat lebih sensitif lagi akan kondisi kesehatan masyarakat disekitarnya khususnya kesehatan reproduksi. Tugas akademisi dalam Tridharma perguruan tinggi dapat menjadi sarana untuk mensosialisasikan hak kesehatan reproduksi pada mahasiswa, masyarakat di daerah dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

B. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan kali ini dilakukan bersamaan dengan pelatihan HAM dasar bagi para dosen se-Indonesia. Peserta berjumlah 36 orang dan kebanyakan dosen fakultas hukum. Kegiatan kali ini dibagi dalam 4 sesi:

- o Pukul 08.45-11.00 : Pemaparan materi dari narasumber yaitu Ninuk

Widyantoro (YKP), dr. Kartono Muhammad (YKP), Dr. Hamin Ilyas (UIN SUKA Yogyakarta) dan Budi Wahyuni (PKBI Yogyakarta).

- o Pukul 11.00-11.30 : tanya jawab dengan peserta.
- o Pukul 13.15-14.00 : Diskusi kelompok. Kelompok dibagi menjadi 4 berdasarkan teritorinya yakni Sumatera,



Sulawesi, Jawa dan Kalimantan.

- o Pukul 14.00-15.30 : Presentasi masing-masing kelompok.

Diskusi kelompok bertujuan untuk mencari temuan-temuan di daerah yang terkait dengan pemenuhan hak atas kesehatan reproduksi dan bagaimana peran pemerintah

role of local governments over the years. This activity went satisfactorily and it should be acknowledged the fact that this issue is still uncommon for some participants.

C. Results

1. Provide an understanding of the importance of reproductive health rights including those mentioned in Law number 36 of 2009.
2. Build a network among lecturers in their respective local area and encourage them to do academic work in which able to contribute to the fulfillment of the right to reproductive health.



participants who are attended the training. This activity is divided into 4 sessions:

- o 08:45-11:00 am : Material elaboration from resource persons namely Ninuk Widyantoro (Women's Health Foundation), dr. Kartono Muhammad (Women's Health Foundation), Dr. Hamin Ilyas (Islamic State University Sunan Kalijaga Yogyakarta) and Budi Wahyuni (PKBI Yogyakarta).
- o 11:00-11:30 am : Questions and Answers
- o 01:15-02:00 pm : Group Discussion. Groups were divided into four based on their area of origin, that are Sumatera, Sulawesi, Java and Kalimantan.
- o 02:00-03:30 pm : Groups' Presentation.

Group discussion was aimed to explore the findings in areas, related to the fulfillment of reproductive health rights and the

This training was held on 10-13 October 2011 at Singgasana Hotel Surabaya and attended by 36 lecturers from various universities

B. Activity Description

one urgent necessity for these lecturers. This consideration also leads PUSHAM UII in cooperation with the Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) University of Oslo Norway to conduct basic human rights training annually.



Constitutional Law and or international law. The situation once again shows that, basic training on human rights become

Human Rights Basic Training for Lecturers, Batch III

disciplines. In that context, nowadays several campuses in Indonesia had made human rights as a compulsory subject, and or optional subject for students. While on the other hand, many lecturers do not have adequate basic knowledge about human rights. The lecturers who then appointed to teach are usually only taken from lecturers of

Studyng human rights require more than simply reading a book. Human rights have now become one scientific discipline that has definitions, principles and structures of science that different with other scientific disciplines. Therefore, the accountability of human rights will inevitably differ from other disciplines.

A. Background

daerah selama ini. Kegiatan ini berjalan cukup lancar dan harus diakui bahwa isu ini masih terbilang "awam" bagi beberapa peserta.

C. Hasil

1. Memberikan pemahaman akan pentingnya hak atas kesehatan reproduksi termasuk yang

2. Membangun jaringan dosen di daerah serta mendorong peserta untuk melakukan kerja-kerja akademis yang sekiranya dapat berkontribusi bagi pemenuhan hak atas kesehatan reproduksi.

Pelatihan HAM Dasar untuk Dosen Baru Gelombang III

A. Latarbelakang

Training HAM terhadap para dosen para pengampu materi hukum HAM dan kewarganegaraan merupakan satu kegiatan yang penting. Mempelajari HAM tidak cukup hanya dengan sekedar membaca sepiantas dan membaca buku seadanya. HAM saat ini telah menjadi satu disiplin ilmu yang memiliki definisi, prinsip-prinsip dan struktur ilmu yang berbeda dengan disiplin ilmu yang lain. Karena itu, pertanggungjawaban HAM pasti akan berbeda dengan

disiplin ilmu yang lain. Dalam konteks itu, saat ini beberapa kampus di Indonesia telah menjadikan materi HAM sebagai mata kuliah yang wajib, dan atau pilihan bagi mahasiswa. Sedangkan pada sisi yang lain, tidak banyak



dosen yang cukup memiliki pengetahuan dasar tentang HAM.

Para dosen yang mengajar biasanya hanya diambil dari pengampu Hukum Tata Negara (HTN) dan atau Hukum Internasional (HI). Situasi tersebut sekali lagi memperlihatkan bahwa, training dasar tentang HAM menjadi satu yang sangat mendesak bagi dosen-dosen tersebut. Latar belakang pemikiran itu juga yang hingga saat ini memantapkan PUSHAM UII bekerjasama dengan NCHR untuk menyelenggarakan pelatihan HAM dasar setiap tahunnya.

B. Deskripsi Kegiatan

Pelatihan HAM Dasar Untuk Dosen Baru Gelombang III ini dilaksanakan pada tanggal 10-13 Oktober 2011 bertempat di Hotel Singgasana Surabaya dan dihadiri oleh 36 orang dosen dari berbagai universitas di Indonesia. Secara konsep pelatihan kali ini tidak banyak berubah dibandingkan dengan training-training dosen baru sebelumnya. Pengelolaan forum masih bersifat ceramah, menonton film yang



berkaitan dengan HAM, dan para peserta ditugaskan untuk bekerja secara berkelompok. Pemateri diberikan ruang yang luas untuk mengelola forum dengan tempo yang dibatasi oleh moderator.

Narasumber yang hadir antara lain Dr. Andang Listya Binawan, SJ (Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat Driyarkara), Prof. Dr. Satya Arinanto (Universitas Indonesia Jakarta), Joseph Adi Prasetya (KOMNAS HAM RI), Sri Palupi (Institute for Ecosoc Rights), Zainal Abidin, S.H. (ELSAM), Kjetil F. Alvsaker (NCHR-Universitas Oslo Norwegia), Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si (Komisi Yudisial RI) dan Dr. Fadillah Agus, S.H., M.H.

Dr. Fadillah Agus, S.H., M.H. (National Judicial Commission) and Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si (NCHR-University of Oslo Norway), S.H. (ELSAM), Kjetil F. Alvsaker for Ecosoc Rights), Zainal Abidin, Commission), Sri Palupi (Institute



in Indonesia. By this time the training concept has not changed much compared to previous trainings. The forum is in form of lecture, watching human rights-related film, and the participants were assigned to work in groups. The spoke persons were given the adequate time-limited forum. invited resource persons are Dr. Andang Listya Binawan, SJ (Driyarkara School of Philosophy), Prof. Dr. Satya Arinanto (Indonesia University Jakarta), Joseph Adi Prasetya (National Human Rights

Developing the Practice of Human Rights and Non-Discrimination Education in Islamic School and Islamic Militants Activists

Annual Report 2011

- A. Background**
- The existence of the Islamic militant activists and community in the midst of modern-state leads to dilemma. A modern-state necessitate human rights as universal reference values in governing the life of the society, while on the other side the community of Islamic militants has its own paradigm as their ideal reference in governing their social life and state, namely the Islamic Sharia Law. Without intentions to polarize between human rights and Islamic Sharia Law, it is consider important to introduce human rights values among the *pesantren* community and Islamic militant activists to avoid conflicts in terms of both implementation in the public sphere.
- B. Description**
- Activities this year only in the form
- C. Results**
- For year 2011, modules that have been created are:
1. Module for Educators
 2. Module for Movement Leaders
 3. Module for Field Activists
 4. Module Live-in for Field Facilitators
- C. Results**
- October to December 2011.
- taking three months time from process of making this module is and Community Organizer. The field of Islamic militant movements experienced practitioners in the This module is made by expert and correspond to the target groups. module is divided into four themes implementation of activities. The a guide to knowledge and since the modules will later used as other activities are carried out, that became the main basis before of making the module and the book

Mengembangkan Praktek Pendidikan HAM dan Non Diskriminasi pada Komunitas Pesantren dan Aktivistis Islam Militan

A. Latarbelakang

Keberadaan komunitas dan aktivis Islam militan di tengah-tengah *modern-state* melahirkan sebuah dilematisme tersendiri. *Modern-state* memprasyaratkan HAM sebagai nilai acuan universal dalam mengatur tata hidup masyarakat, sedangkan di sisi lain komunitas Islam militan memiliki paradigma sendiri yang menjadi acuan ideal dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu Syariah Islam. Dengan tidak bermaksud mempertentangkan antara HAM dan Syariah Islam, namun dirasa penting untuk memperkenalkan nilai-nilai HAM dikalangan komunitas pesantren dan aktivis Islam militan agar tidak terjadi sebuah konflik dalam hal

penerapan keduanya di ruang publik.

B. Deskripsi

Kegiatan tahun ini hanya berupa pembuatan modul dan buku yang menjadi basis utama sebelum kegiatan yang lain dilakukan karena modul yang dibuat tersebut nantinya dijadikan panduan pengetahuan dan panduan pelaksanaan untuk kegiatan dilapangan. Modul ini dibagi menjadi empat tema sesuai dengan kelompok sasaran yang dituju. Modul ini dibuat oleh para praktisi yang ahli dan pengalaman di bidang gerakan Islam Militan dan *Community Organizer*. Proses pembuatan modul ini selama tiga bulan (Oktober-Desember) 2011.

C. Hasil

Untuk tahun 2011, modul yang telah berhasil dibuat adalah:

1. Modul untuk Para Pendidik
2. Modul untuk Pemimpin Gerakan
3. Modul untuk Aktifis Lapangan
4. Modul *Live-in* bagi Pendamping Lapangan

Pelatihan Metodologi Penelitian Hak Asasi Manusia dan Resolusi Konflik bagi Dosen dan Aktifis LSM se-Asia Tenggara

A. Latar Belakang

Training ini dilatari oleh beberapa pemikiran antara lain *pertama*, lekat sekali pemahaman publik bahwa hak asasi manusia merupakan nilai barat dan tidak sesuai dengan komunitas di Asia Tenggara; *kedua*, Asia Tenggara merupakan wilayah dimana pelanggaran hak asasi manusia selalu terjadi; *ketiga*, potensi dan situasi konflik masih menghiasi peradaban bangsa di Asia Tenggara seperti konflik di Indonesia antara pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka dan Organisasi Papua Merdeka, konflik di Pattani Thailand Selatan, konflik

pemerintah Filipina dengan pejuang pembebasan bangsa Moro di Mindanao, konflik antara Thailand dan Kamboja tentang perbatasan, konflik antara pemerintah dan partai dan aktifis pro demokrasi pimpinan Aung San Syu Kyi di Burma dan lain-lain.

Untuk menyikapi berbagai persoalan di atas, maka pada tahun 2010, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia bersama beberapa Pusat Studi Hak Asasi Manusia di beberapa negara menginisiasi dibentuknya jaringan yang kemudian diberi nama South East Asian Human Rights Study Center Network (SEAHRN) yang

To address the above issues, then in 2010, the Centre for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia with several other Centres in several countries initiating the establishment of a network which then named the South East Asian Human Rights Network (SEAHRN) consisted by various Centres from Indonesia, the Philippines, Thailand, Vietnam, Malaysia and Cambodia. Various activities have been implemented by this network since 2010 and one of 2011 program is to conduct human rights and conflict resolution training for lecturers and NGO activists from Southeast Asia. This training was conducted to increase the capacity of lecturers and human rights activists to produce more writings and researches on human rights and

Human Rights and Conflict Resolution Research Methodology Training for Lecturers and NGO Activists in Southeast Asia

A. Background

This training was originated from several thinking. First is the public understanding where human rights are western values that are not suitable Southeast Asian values. Second is Southeast Asia is a region where human rights violations always occur. Third is conflict potencies and situations still common in Southeast Asia, for examples conflict between the government of Indonesia with Free Aceh Movement and Free Papua Organization; the conflict in Patani-Southern Thailand; conflict between the government of Philippines with Moro liberation fighters in Mindanao, the border conflict between Thailand and Cambodia; and the conflict between the Burmese government with pro-democracy party and activists lead by Aung San Syu Kyi

Burma, Laos, Malaysia, and East Timor. Participants were lecturers from various Faculty of Law and Faculty of Political Science and also NGO activists. In this training, participants were also invited to see the situation of the refugees who live in the shelter of Merapi and visit three non-governmental organizations in Yogyakarta, among others, Samin Foundation, Yogyakarta Legal Aid Institution and Rifka Annisa Foundation. Speakers at this training, among others are Kamaruzzaman Askandar from the Malaya Science University, Azmi Sharom from the Faculty of Law University of Malaya, Sripraha Petharanshere, Mike Hyes and Yanuar Sumarian from Mahidol University Thailand, Eko Riyadi from the Islamic University of Indonesia, Arts Arif Mundayat from Gajah Mada University and Melizet Asuncion from the Ateneo University of the Philippines.

Besides this, the training is also useful to extend the SEAHRN network and also bring together lecturers and activists from various countries to consolidate the efforts to make the human rights position in Southeast Asia more solid. The training was conducted in cooperation between the Centre for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia (UII PUSHAM), Centre for Southeast Asian Social Studies University of Gajah Mada (UGM-PSSAT), South East Asian Human Rights Network (SEAHRN) and supported by the Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI), Lund University, Sweden.

B. Activity Description

terdiri dari berbagai Pusat Studi di Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia dan Cambodia. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh jaringan ini sejak 2010 dan pada tahun 2011 salah satu programnya adalah mengadakan pelatihan hak asasi manusia dan resolusi konflik bagi dosen dan aktifis LSM dari kawasan Asia Tenggara.

Training ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas para dosen dan aktifis hak asasi manusia untuk lebih banyak menghasilkan tulisan dan melakukan penelitian tentang isu-isu hak asasi manusia dan konflik. Selain hal tersebut, training ini juga berguna untuk memperluas jaringan SEAHRN dan juga mempertemukan para dosen dan aktifis dari berbagai negara agar upaya pemantapan posisi hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara akan semakin baik dan solid.

Training terlaksana berkat

kerjasama antara Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Pusat Studi Sosial Asia Tenggara Universitas Gajah Mada (PSSAT-UGM), South East Asian Human Rights Study Center Network (SEAHRN) dengan Raoul Wallenberg Institut of Human Rights and Humanitarian Law (RWI), Lund University, Sweden.

B. Deskripsi

Training ini diikuti oleh 30 orang peserta yang berasal dari Indonesia, Filipina, Thailand Vietnam, Burma, Laos, Malaysia, dan Timor Timur. Peserta adalah dosen dari berbagai Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Politik serta aktifis lembaga swadaya masyarakat. Pada training ini, peserta juga diajak untuk melihat situasi para pengungsi yang tinggal di shelter Merapi serta berkunjung ke tiga Lembaga Swadaya Masyarakat di Yogyakarta antara lain Yayasan Samin, Lembaga

Bantuan Hukum Yogyakarta dan Rifka Annisa. Narasumber pada training ini antara lain Kamaruzzaman Askandar dari University Sains Malaya, Azmi Sharoom dari Fakultas Hukum University of Malaya, Sriprapha

Petharamshere, Mike Hyes dan Yanuar Sumartian dari Universitas Mahidol Thailand, Eko Riyadi dari Universitas Islam Indonesia, Aris Arif Mundayat dari Universitas Gajah Mada dan Melizel Asuncion dari Ateneo University of Filipina.

Penelitian Evaluasi Buku "Hukum Hak Asasi Manusia"

A. Latarbelakang

Pada tahun 2008, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM-UII) Yogyakarta bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) University of Oslo, Norway telah menerbitkan buku yang berjudul "Hukum Hak Asasi



Manusia". Secara umum, buku tersebut digunakan sebagai bacaan wajib oleh 4 (empat) komunitas utama antara lain

mengajar mata kuliah hukum hak asasi manusia, namun juga dosen fakultas hukum pada umumnya. *Kedua*, mahasiswa pada fakultas hukum di semua jenjang pendidikan, Strata 1, Strata 2 dan Strata 3. *Ketiga*, aktifis lembaga swadaya masyarakat yang bergerak

di bidang hak asasi manusia. *Keempat*, institusi pemerintah.

The research was done in two ways: through a Focus Group Discussion (FGD) and interviews. The FGD were conducted in three areas, namely (1) Medan, by inviting

B. Description



more than 2 (two) years. The book has also been printed for two times. Currently, there are developments of human rights discourse that led to necessary changes in the book. To find out comprehensively on how the Indonesian public acceptance of the book and gather input for improvements, then we conducted an evaluation study of the book.

faculty of law in all programs: undergraduate, postgraduate and doctoral program; *third*, NGO activists working in human rights field; *fourth*, the government institutions. The textbook has been used for

first, lecturers at the faculty of law and not limited to the lecturers who taught human rights law, but also all lecturers in law faculties in general; *second*, all students in the

major communities that are: used as required reading by four Rights Law". In general, the book is published a book entitled "Human University of Oslo, Norway has Centre for Human Rights (NCHR) cooperation with the Norwegian Indonesia (PUSHAM-UII) in Rights Studies Islamic University of in 2008, the Centre for Human

A. Background

Evaluation Research: The Use of Human Rights Law Textbook

the people of Indonesia in general, human rights law lecturers and to disseminated particularly to the book should remain produced and human rights, and therefore the comprehensive elaboration on only book that contains study are (1) the textbook, is the analyzed, the conclusions of this Once data is collected and

C. Results

Norwegian Centre for Human Rights University of Oslo, Norway.

team with support from the February 2011 by PUSHAM UII's months from November 2010 to Research carried out for four authors and readers of the book.

Interviews were conducted to the participants from Sulawesi, and (3) Balikpapan, by inviting Java, Central Java, and East Java, participants from Jakarta, West Jambi, (2) Yogyakarta, by inviting Sumatra, Aceh, Padang, Riau and Human Rights Law lecturers from



Buku "Hukum Hak Asasi Manusia" telah digunakan selama lebih dari 2 (dua) tahun. Buku tersebut juga telah dicetak selama 2 (dua) kali. Saat ini, terjadi perkembangan wacana hak asasi manusia yang menyebabkan beberapa bagian dalam buku tersebut dirasa perlu untuk di up date dan juga dilengkapi. Untuk mengetahui secara komprehensif bagaimana penerimaan masyarakat Indonesia terhadap buku tersebut dan mengumpulkan masukan tentang upaya perbaikan yang harus dilakukan, maka dilakukanlah penelitian evaluasi terhadap buku tersebut.

B. Deskripsi

Penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu mengadakan *Focus Group Discussion (FGD)* dan Wawancara. FGD dilakukan di tiga wilayah yaitu (1) Medan, dengan

mengundang peserta yaitu dosen pengajar mata kuliah Hukum HAM dari Sumatra, Aceh, Padang, Riau, dan Jambi; (2) Yogyakarta, dengan mengundang peserta dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur; dan (3) Balikpapan, dengan mengundang peserta dari Sulawesi, Kalimantan, Bali-NTT-NTB dan Papua. Wawancara dilakukan kepada para penulis dan pembaca buku tersebut.

Penelitian dilaksanakan selama 4 (empat) bulan yaitu November 2010-Februari 2011 oleh Tim Pusat Studi Hak Asasi Manusia dengan dukungan dari Norwegian Center for Human Rights University of Oslo, Norway.

C. Hasil Penelitian

Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, kesimpulan dari penelitian ini antara lain (1) buku dengan judul Hukum Hak Asasi Manusia terbitan PUSHAM UII, hingga saat ini, adalah satu-satunya buku yang cukup lengkap membicarakan hak asasi manusia, oleh karena itu buku tersebut harus tetap diproduksi dan disebarluaskan khususnya kepada

para pengajar mata kuliah Hukum HAM di Fakultas Hukum dan umumnya kepada masyarakat Indonesia; (2)

Buku tersebut menjadi referensi wajib bagi pembelajaran mata kuliah Hukum HAM; (3) Kelemahan

buku tersebut antara lain masih banyak salah cetak dan kekurangsempurnaan editing, oleh karena itu dibutuhkan editing yang lebih sempurna sebelum dicetak pada masa yang akan datang; (4) pada beberapa bagian buku tersebut perlu ditambah dengan materi perkembangan baru seperti perubahan mekanisme HAM ASEAN dan telah disahkannya *Convention*



on the Rights of People with Disabilities (CRPD).

(2) the book became a compulsory reference for human rights law subject, (3) lot of misprinting and editing errors, that require more thorough editing before get printed, (4) require addition on new issues such as changes in the ASEAN human rights mechanism and endorsement of the Convention on the Rights of People with Disabilities (CRPD).



S.H., M.SI and other human rights figures. This activity was initiated by an idea to make human rights lectures for both students and community activists and later responded through implementing this first discussion and hopefully continued by other discussion regularly.

The lecture has goals as follows:

1. Develop awareness among activists, particularly young activists to enable them to share their ideas and thoughts in the discussion.
2. Mobilize activists' movement to fight for justice particularly cases of violations of human rights and law.
3. Build a network and solidarity among human rights activists.

This activity was started from regular monthly discussion on various actual themes in previous years. Numbers of injustice and human rights abuses cases in Indonesia requires real advocacy measures. Therefore it is important and necessary for PUSHAM UJI to conduct lecturing for human rights activists in Yogyakarta and surrounding areas. This discussion which was organized by PUSHAM UJI in collaboration with student and community activists, is trying to design more quality discussion by bringing in qualified leaders such as Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M. Hum, Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M, Prof. Dr. Moh. Mahfudz MD, S.H., S.U., Dr. Suparman Marzuki,

A. Background

Human Rights Lecturing for Activists in Yogyakarta

Kuliah HAM bagi Aktifis di Yogyakarta

A. Latarbelakang

Berawal dari diskusi rutin bulanan yang mengangkat berbagai tema aktual di tahun-tahun sebelumnya. Banyaknya kasus-kasus ketidakadilan dan pelanggaran HAM di Indonesia ini perlu adanya tindakan-tindakan riil untuk mengadvokasinya. Oleh karena itu Pusham Uji merasa sangat perlu untuk melakukan sebuah kuliah HAM bagi para aktifis di Yogyakarta dan sekitarnya. Program diskusi yang diselenggarakan oleh Pusham Uji bekerjasama dengan para aktifis mahasiswa dan masyarakat ini mencoba untuk lebih serius mendesain diskusi yang berkualitas dengan mendatangkan para tokoh seperti Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum, Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M, Prof. Dr. Moh. Mahfudz MD, S.H., S.U., Dr. Suparman

Marzuki, S.H., M.SI dan tokoh-tokoh HAM lainnya. Program diskusi ini berawal dari adanya ide dari sebuah diskusi di Pusham Uji akan pertunya membuat kuliah HAM bagi para aktifis baik mahasiswa maupun masyarakat. Oleh karena itu Pusham Uji merespon ide tersebut dan mencoba untuk melaksanakan kegiatan serupa setiap bulan dan diawali dengan kuliah pertama ini. Kuliah HAM bagi aktifis ini mempunyai tujuan:

1. Menumbuhkan kesadaran bagi para aktifis, khususnya aktifis muda untuk menyalurkan ide-idenya dan didiskusikan dalam kuliah.
2. Menggalang gerakan aktifis untuk memperjuangkan keadilan terutama kasus pelanggaran HAM dan hukum.

3. Membangun jaringan dan solidaritas aktifis hak asasi manusia.

B. Deskripsi

Sebagai pembuka, kuliah HAM bagi para aktifis ini pertama kali diselenggarakan pada tanggal 19 November 2011 di ruang meeting kantor Pusham Uii dengan narasumber Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum. Diskusi berlangsung dari jam 15.00-17.00 WIB dan dihadiri sekitar 35 orang. Kuliah dimulai dengan mengungkapkan berbagai sejarah



pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan bagaimana tanggung jawab negara untuk menyelesaikannya. Hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat belum terpenuhi oleh Pemerintah, padahal

sumber daya alam Indonesia sangat kaya yang justru banyak yang dijual keluar negeri. Bahkan Negara tidak melindungi ekonomi rakyat, dengan melakukan impor hasil pertanian

State does not protect the people's economy, by importing agricultural products and technology from other countries, giving rise to losses both for farmers and thus, national trade. The State seems does not seriously



Indonesia's natural resources are very rich that actually many of which are sold abroad. Even the

history of human rights violations that occurred in Indonesia and State's responsibility in solved it. The society's economic, social and cultural rights have not been met by the government, whereas

with Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum as single speaker. Discussions take place from 3:00 p.m. to 5:00 p.m. and attended by 35 people. It begins by elaborating the

This lecture was held on November 19, 2011 at PUSHAM's meeting room

B. Activity Description

government to resolve human rights violations both civil-political rights and ESC rights.

C. Results

1. The implementation of human rights lectures for activists in enriching their insights and develop awareness among activists to advocate victims of human rights violations.
2. The establishment of networks among students and community. This lecture is very useful to be continued and expanded for all students in Yogyakarta and surrounding areas.
- 3.

resolve human rights violations, and blaming the public/victims instead. From the discussion then developed ideas to had joint movements to advocate victims that mostly unknowledgeable of law and often mocked by law enforcement officials. There should be clear concept, clear intention, and clear format to fix the corruption in this country such as depravity of the legislative, executive, media and forum ended with an agreement to re-empower the campus to enable them to perform movements to fight injustices and urge the

dan teknologi dari luar negeri sehingga menimbulkan kerugian bagi petani dan perdagangan di dalam negeri. Dalam diskusi ini terkesan negara tidak serius menyelesaikan pelanggaran HAM, bahkan seringkali menyalahkan masyarakat/korban. Dalam diskusi berkembang pemikiran untuk bersama bergerak untuk melakukan advokasi pada korban yang kebanyakan buta hukum dan sering dipermainkan oleh aparat penegak hukum. Perlu ada konsep yang jelas, ada niat yang jelas, rumusan dan format yang jelas untuk membenahi kebobrokan di Negara ini, mulai dari kebobrokan legislatif, eksekutif, media dan dunia kampus. Forum diakhiri dengan kesepakatan untuk memberdayakan lagi kampus agar dapat melakukan gerakan untuk

melawan ketidakadilan dan berusaha mendorong pemerintah menuntaskan pelanggaran HAM baik sipol maupun ekosob.

C. Hasil

1. Terselenggaranya kuliah HAM bagi aktifis guna menambah wawasan dan menumbuhkan kesadaran para aktifis untuk membela dan mengadvokasi para korban pelanggaran HAM.
2. Terjalannya jaringan antara aktifis mahasiswa dengan aktifis masyarakat (Presidium COP) untuk bergerak bersama.
3. Kuliah HAM bagi Para aktifis sangat bermanfaat sehingga perlu diadakan secara kontinyu dan diperluas pada seluruh BEM yang ada di Yogya dan sekitarnya.